

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan akuntansi pada sektor publik, terutama di Indonesia bertambah besar pada masa reformasi untuk penerapan kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal yang menekankan perangkat daerah. Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belakangan ini jadi sorotan publik sebab banyak sekali masyarakat mulai menanyakan nilai yang masyarakat dapat atas pelayanan dari pemerintah. OPD juga dituntut bertanggung jawab pada lembaga-lembaga publik dari daerah atau pusat, yang menimbulkan semua lembaga pemerintah membuat suatu perencanaan strategi ialah melaksanakan pengukuran kinerja serta melaporkannya (Haryani & Julita, 2021). OPD merupakan aparat pemerintahan selaku pelaksana dari aktivitas pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan suatu lingkungan kerja secara kondusif yang mengintegrasikan keahlian pimpinan serta keahlian bawahan (Fauzan, 2016).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering disebut pelayan masyarakat, di Indonesia keberadaan OPD diakui dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu subsistem dari sistem pada pemerintahan nasional. Pemerintah Indonesia mengeluarkan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berbunyi pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan rumah

tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, inspektorat, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinas daerah dan badan daerah, juga dalam kabupaten/kota perangkat daerah ditambahkan dengan kecamatan (Rauf, 2017).

Setelah adanya otonomi daerah yang dulunya sentralisasi menjadi desentralisasi, dalam mewujudkan suatu sistem desentralisasi dengan transparan, secara efektif, efisien, serta bisa dipertanggung jawabkan dengan masyarakat banyak. Hal ini dibutuhkan sistem pengelolaan untuk keuangan daerah yang lebih baik dalam melaksanakan otonomi daerah lewat tata kelola pada pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Konsep tersebut menuntut adanya perkembangan kinerja pada institusi baik pemerintah, bisnis serta masyarakat yang komprehensif di seluruh tingkatan (Patriadi, 2004). Melalui penyelenggaraan otonomi di daerah ditujukan untuk memusatkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat lewat kenaikan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat, juga tingginya daya saing di daerah, dalam hal ini adalah konsekuensi dari penerapan otonomi daerah, yang mana pemerintah daerah dituntut dalam meningkatkan kinerja pada mutu pelayanan kepada masyarakat (Siregar et al., 2021).

Adanya tuntutan masyarakat yang meningkat terhadap penyelenggaraan pada pemerintahan yang baik mampu mendorong adanya pengembangan serta penerapan dari sistem pertanggungjawaban secara efektif serta jelas. Cara untuk mewujudkan pemerintahan yang sangat baik adalah adanya penerapan pada akuntabilitas kinerja di pemerintahan seperti pengelolaan di pemerintahan daerah atau pusat serta dapat mengganti suatu keadaan pada pemerintah yang sangat kurang

ketika memberi suatu pelayanan publik dengan baik juga bersih pada praktik KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah yaitu suatu perwujudan kewajiban pada instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan serta kegagalan pada pelaksanaan dalam misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan organisasi (Haryani & Julita, 2021). Berdasarkan pendapat dari (Hafiz, 2017) Akuntabilitas dipercayai dapat mengubah suatu kondisi dalam pemerintahan yang tidak bisa memberikan suatu pelayanan publik dengan baik serta korup menuju pada tatanan pemerintahan secara demokratis.

Akuntabilitas tidak saja sebatas kewajiban dalam melaporkan hasil suatu pekerjaan. Akuntabilitas juga mencakup pencapaian dari tujuan oleh apa yang dilakukan, perspektif sistem pada akuntabilitas, adanya beberapa fitur akuntabilitas, seperti fokus terhadap hasil, memakai berbagai indikator yang menjadi pilihan dalam mengukur kinerja, memberikan informasi yang sangat berguna bagi pembuat keputusan suatu program bahkan kebijakan, menghasilkan suatu data dengan konsisten sepanjang masa dan pelaporan terhadap hasil (Karima et al., 2021). Berdasarkan pendapat tersebut akuntabilitas dapat dijadikan sebagai kontrol aparatur atas segala yang telah dilakukan pada pemerintah. Jadi akuntabilitas yang baik mampu mencerminkan pemerintahan yang baik pula.

Berdasarkan fenomena yang ada, di kabupaten Pati memiliki akuntabilitas kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat tercermin dengan adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pati yang terakreditasi B sejak tahun 2018 lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

yang dapat disingkat PANRB bahwa SAKIP melakukan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja, melainkan SAKIP juga bisa mencegah pemborosan anggaran pada jatengprov.go.id. SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan elektronik untuk memudahkan dalam proses memantau dan mengendalikan kinerja dari OPD di kabupaten Pati guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD pada khususnya serta pada umumnya. Tujuan adanya SAKIP untuk sarana pembinaan interaktif melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sarana penyampaian laporan kinerja OPD secara online. Berikut ini adalah data akuntabilitas kinerja pada SAKIP Pati:

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja OPD

Indikator Kinerja	Target		
	2019	2020	2021
Penanganan gabungan keamanan & ketertiban sosial	63,13%	63,13%	69,14%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,41	71,41	72,21
IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,07	92,07	91
IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	69,00	69,00	70,00
Tingkat Kemiskinan	10,22%	10,22%	9,86%
Indeks Gini	0,31	0,31	0,30
PDRB Perkapita	28375241	28375241	28685401
Indeks Reformasi Birokrasi	64	64	64,5
Nilai PDRB ADHK (=000.000)	-	-	-
Tingkat laju pertumbuhan ekonomi	5,47%	5,47%	5,54%
Inflasi daerah	2,76%	2,76%	2,88%
Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	82,47%	82,47%	83,61%
Indeks kualitas lingkungan hidup	58,35	58,35	64,38

Indikator Kinerja	Target		
	2019	2020	2021
Penurunan indeks risiko bencana	154	154	149

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 pencapaian kinerja OPD di kabupaten Pati tampak sama atau stabil, sedangkan pada tahun 2021 ini terlihat pada data adanya beberapa peningkatan. Peningkatan data seperti tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, indeks kualitas lingkungan hidup yang semakin meningkat dan terdapat beberapa penurunan yaitu tingkat kemiskinan yang menurun serta penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja OPD di kabupaten Pati semakin meningkat pada tahun 2021 ini. Cara untuk mengakses data tersebut bisa melalui <http://sakup.patikab.go.id/>, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dipengaruhi beberapa faktor untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang baik.

Akuntabilitas kinerja banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain dalam penelitian ini akan membahas tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian intern, ketaatan pada peraturan perundangan, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan pemahaman akuntansi. Faktor yang pertama yaitu kejelasan sasaran anggaran yaitu seberapa jauh tujuan anggaran tersebut ditetapkan dengan spesifik juga jelas berdasarkan tujuan supaya anggaran mampu dimengerti pada pihak yang bertanggung jawab dari tercapainya sasaran anggaran tersebut (Bastian, 2010). Kejelasan dari tujuan

anggaran yang spesifik sangat bermanfaat, dibandingkan dengan tujuan anggaran yang tidak spesifik menurut pendapat (Adisaputro dan Anggraini, 2019:154). Berdasarkan dari penelitian (Wahyuni, 2014) yang mengemukakan pendapat yaitu kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif dengan akuntabilitas kinerja OPD, selain itu berdasarkan penelitian dari (Mulyadi et al., 2018) bahwa kejelasan sasaran anggaran sangat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2015) bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh dengan akuntabilitas kinerja.

Faktor yang kedua yaitu kompetensi aparatur pemerintah, kompetensi itu sendiri yaitu suatu karakteristik individu yang mempunyai peran penting untuk organisasi dalam meningkatkan suatu kinerja instansi pada pemerintah menurut (Wardhana et al., 2015). Kompetensi adalah suatu faktor penentu seseorang dalam menampilkan kinerja terbaiknya. Kompetensi aparatur pemerintah yang tinggi akan mempengaruhi tingginya akuntabilitas kinerja OPD. Berdasarkan penelitian (Biworotomo, 2016) bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Sukoco, 2019) bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Faktor yang ketiga adalah pengendalian intern. Pengendalian intern adalah cara dalam mengarahkan, mengawasi juga mengukur sumber daya dalam organisasi juga berperan sangat penting pada pencegahan serta pendeteksian penggelapan fraud menurut (Rahman, 2012). Sistem pengendalian intern bermaksud dapat meningkatkan keefektifitasan dan keefisienan pada operasi organisasi sehingga

mampu mengendalikan biaya yang berguna dalam mencapai suatu tujuan organisasi, serta tujuan ketaatan pada hukum dan peraturan yang ada dimasukkan dalam meningkatkan ketaatan suatu entitas pada hukum serta peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan penelitian (Afrina, 2015) bahwa pengendalian intern berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haryani & Julita, 2021) bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dengan akuntabilitas kinerja.

Faktor yang keempat adalah ketaatan pada peraturan perundangan. Berdasarkan penelitian dari (Bastian, 2010:33), yang menjelaskan ketaatan pada peraturan perundangan yaitu suatu kepatuhan ketika menaati aturan yang dibuat lembaga negara ataupun pejabat yang mempunyai wewenang serta memiliki kekuatan mengikat supaya bisa mengatur serta menertibkan dalam kehidupan berbangsa juga bernegara. Ketaatan pada peraturan perundangan sangatlah penting serta mampu mempengaruhi akuntabilitas kinerja suatu lembaga, jika ketaatan pada peraturan perundangan sangat tinggi atau sangat patuh maka dapat dipastikan bahwa akuntabilitas suatu organisasi atau badan juga tinggi. Penelitian yang dari (Mubaraq, 2017) bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif dengan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan penelitian dari (Oktaviani et al., 2019) justru mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Faktor yang kelima adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah. Menurut (Sella et al., 2020) dalam penelitiannya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yaitu suatu proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

dan pelaporan keuangan untuk bahan pertanggungjawaban dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sangat bermanfaat dan sangat penting dalam pemerintahan daerah, tentunya SAPD sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD. SAPD dijalankan secara maksimal maka akuntabilitas kinerja OPD juga meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Karima et al., 2021) bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh positif dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sella et al., 2020) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan berdasarkan penelitian dari (Soleman et al., 2019) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) juga tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Faktor yang keenam adalah pemahaman akuntansi. Menurut (Hasibun, 2018) akuntansi dapat diartikan yaitu suatu kemampuan manajer keuangan dalam mengolah informasi akuntansi serta menyusun menjadi laporan keuangan yang sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari (Suwardjono, 2005) bahwa pengetahuan akuntansi dapat diartikan yaitu pengetahuan akuntansi bisa dipandang pada dua sisi yang berbeda, yang pertama sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang diajarkan pada perguruan tinggi dan yang satunya dapat dipandang sebagai pengetahuan profesi atau keahlian seseorang. Pembuatan dan penyampaian laporan keuangan daerah yang baik diperlukan adanya pemahaman akuntansi oleh karyawan, sehingga laporan memiliki kualitas yang tinggi, sesuai standar yang berlaku dan tentunya relevan ketika dibuat dalam pengambilan suatu

keputusan pendapat dari (Karima et al., 2021). Pemahaman akuntansi yang tinggi sangat mempengaruhi akuntabilitas kinerja dari OPD. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Oktaviani et al., 2019) bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dengan akuntabilitas kinerja. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari (Sella et al., 2020) bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dengan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten dan bertentangan, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji akuntabilitas kinerja. Penelitian ini yaitu pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Haryani & Julita, 2021). Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu adanya penambahan variabel independen sebagai faktor kelima yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut karena dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah OPD harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai SAPD yang berlaku, karena SAPD mampu memberikan informasi keuangan yang cermat, lengkap, bentuk dan waktu yang tepat baik secara manual maupun terkomputerisasi. Hal ini berguna bagi pihak-pihak yang bertanggungjawabkan kerjanya terhadap pemerintah.

Penambahan variabel independen yang kedua adalah pemahaman akuntansi yang menjadi faktor keenam yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja OPD. Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut adalah OPD harus memiliki pemahaman akuntansi yang tinggi, serta bisa mengolah informasi akuntansi juga

menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku yang akhirnya menjadi laporan yang berkualitas juga relevan untuk pengambilan keputusan. Perbedaan yang kedua yaitu objek penelitian, pada objek penelitian dari (Haryani & Julita, 2021) yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pekanbaru, sedangkan pada penelitian ini objeknya yaitu Organisasi perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, untuk itu peneliti mengambil judul **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pengendalian Intern, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati).**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar penelitian ini memudahkan pembahasan dan tidak menyimpang sehingga sesuai dengan tujuan dari penelitian serta pokok pembahasan terperinci, maka peneliti membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Variabel independen yang diteliti pada penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian intern, ketaatan pada peraturan perundangan, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah,

pemahaman akuntansi dan variabel dependen pada penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja.

2. Objek penelitian OPD di kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati?
2. Apa pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati?
3. Apa pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati?
4. Apa pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati?
5. Apa pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati?
6. Apa pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati.
4. Untuk menganalisis pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati.
5. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati.
6. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Pati.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a) Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini mampu menjadi pedoman atau referensi pembaca dalam penelitian pada masa mendatang serta untuk khasanah pustaka tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur pemerintah, pengendalian intern, ketaatan pada peraturan perundangan, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan pemahaman akuntansi terhadap

akuntabilitas kinerja (studi pada organisasi perangkat daerah di kabupaten Pati).

b) Manfaat bagi penelitian lebih lanjut

Bagi peneli selanjutnya, penelitian ini diharap mampu menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai akuntabilitas kinerja dengan variabel independen yang lain.

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat bagi OPD kabupaten Pati

Penelitian ini dapat memberikan informasi sejauh mana akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan nantinya dapat menjadi sarana informasi dan acuan bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk kebijakan selanjutnya.

b) Manfaat bagi masyarakat

Penelitian sebagai sarana informasi mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

